

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Transparansi

Transparansi merupakan tersedianya informasi tentang pemerintahan publik dan adanya kemudahan dalam memperoleh suatu informasi yang akurat dan memadai (Dwiyanto, Agus, 2017:80) .

Transparansi adalah keterbukaan suatu informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan secara terbuka (Mahmudi, 2016:17) .

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa:

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-Undangan”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan kemudahan dalam mengakses suatu informasi yang dibutuhkan serta memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta.

2.1.1.1 Manfaat Transparansi

Manfaat Transparansi menurut (Nico,Adrianto 2017 :15) diantaranya:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja Lembaga
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen Lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan pemangku kebijakan karena kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga

2.1.1.2 Dimensi Transparansi

Dimensi Transparansi menurut Edowai et al (2021) yang mengutip dari (mardiasmo, 2018:19) yaitu:

1. *Informativeness* (informatif) adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator informatif antara lain :
 - a. Tepat waktu
Laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan.
 - b. Memadai

Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima serta memanfaatkan informasi tersebut. Akurat berarti informasi harus jelas yang mencerminkan maksudnya.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenisnya. Oleh karena itu, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan kinerja organisasi sejenisnya.

f. Mudah diakses

g. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. *Openness* (keterbukaan) adalah keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna.

3. *Disclosure* (pengungkapan) adalah pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholder) atas aktivitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b. Susunan pengurus

Komponen-komponen (unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.1.3 Pengukuran Transparansi

Indikator Transparansi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Yaitu :

1. Tersedianya Pengumuman Kebijakan Anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara / usulan rakyat
5. Tersedia sistem pemberian informasi kepada publik

2.1.2 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

2.1.2.1 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Robbins & Timothy A. Judge, 2014:20)

Komitmen Organisasi merupakan sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi, dengan cara tetap bertahan didalam organisasi, memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasi dengan alasan apapun (Yusuf Mardiana & Syarif, 2018:32).

Menurut Steers & Porter (1974) dalam (Indriasih et al., 2022) Komitmen Organisasi merupakan perilaku dimana seseorang mengidentifikasi dengan harapan dan tujuan organisasi di mana ia bekerja serta berusaha untuk mempertahankan keanggotaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan komitmen organisasi yaitu keyakinan karyawan untuk berada didalam organisasi dengan menerima nilai- nilai, tujuan organisasi dan berkeinginan untuk berkembang serta mempertahankan keanggotaannya.

2.1.2.2 Dimensi Komitmen Organisasi

Terdapat Tiga Dimensi Komitmen Organisasional menurut Allen dan Meyer (Yusuf Mardiana & Syarif, 2018:36) yaitu:

1. Komitmen Afektif (*Affective Commitment*)

Komitmen ini berkaitan dengan emosional, pemahaman dan keterlibatan seorang karyawan terhadap organisasinya. Di dalam komitmen ini, karyawan mengikatkan dirinya dengan organisasi dan loyal terhadap organisasi.

Karyawan akan lebih kuat apabila pengalamannya dalam suatu organisasi dilakukan secara konsisten dengan harapan-harapan dan menunjukkan keinginan individu karyawan untuk terus bekerja bagi organisasi yang disebabkan oleh kesetujuannya dengan organisasi tersebut dan memang berkeinginan untuk melakukannya bagi organisasi.

2. Komitmen berkelanjutan (*Continue Commitment*)

Komitmen ini berkaitan dengan kecenderungan individu untuk mengikatkan diri terhadap berbagai aktivitas organisasi yang didasarkan pada kesadaran dan penilaian untung rugi (pengorbanan) yang dirasakan individu karyawan yang apabila berhenti atau meninggalkan dalam melakukan berbagai aktivitas organisasi. Komitmen ini muncul dimana karyawan tetap bertahan dalam organisasi yang mungkin membuatnya tidak betah namun yang membuatnya bertahan karena dia masih membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan yang didapat dalam organisasi ataupun karena dia tidak menemukan pekerjaan lain.

3. Komitmen normatif (*Normative Commitment*)

Komitmen ini didasarkan pada norma-norma atau prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada dalam diri individu karyawan yang menimbulkan adanya keyakinan individu karyawan atas tanggung jawabnya terhadap organisasi. Karyawan merasa harus bertahan karena adanya rasa tanggung jawab dan loyalitas terhadap organisasi. Kunci dari komitmen ini yaitu kewajiban untuk bertahan dalam organisasi.

2.1.2.3 Faktor-faktor komitmen organisasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yaitu :

1. Karakteristik pribadi yang berhubungan dengan usia dan masa kerja, tingkat Pendidikan, status perkawinan serta jenis kelamin
2. Karakteristik pekerjaan yang berhubungan dengan peran, otonomi, jam kerja, tantangan dalam pekerjaan, dan tingkat kesulitan dalam pekerjaan
3. Pengalaman kerja dipandang sebagai sesuatu kekuatan sosialisasi utama yang memiliki pengaruh penting terhadap pembentukan ikatan psikologi dalam organisasi
4. Karakteristik yang meliputi kemajuan karir dan peluang promosi, besar atau kecilnya organisasi serta tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan

2.1.2.4 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa 2018 menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah”.

Perangkat pengelolaan keuangan desa yang dimaksud adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, serta Kaur Keuangan

1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa mempunyai kewenangan yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
 - c. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
 - d. Menetapkan PPKD
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
 - f. Menyetujui RAK Desa dan
 - g. Menyetujui SPP
2. Sekretaris Desa bertindak sebagai Koordinator PPKD yang mempunyai tugas:
- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan penjabaran APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan penjabaran APBDesa
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas diatas, sekretaris juga mempunyai tugas :

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL

- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa
3. Kaur dan kasi mempunyai tugas :
- a. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidangnya
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Kaur dan kasi yang dimaksud yaitu kaur terdiri dari Kaur tata usaha dan umum serta Kaur perencanaan, sedangkan kasi terdiri dari Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan dan Kasi pelayanan.

4. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas:
- a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi pembangunan (Solekhan 2014:153).

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah maupun potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan serta alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi Isbandi (2007) dalam (Valensya et al., 2022)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa:

“Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan tahap evaluasi pembangunan, serta menyampaikan aspirasi serta saran untuk kemajuan daerah.

2.1.3.1 Dimensi Partisipasi Masyarakat

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, 2011 yaitu:

1. Menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggungjawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi
2. Mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik
3. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi dan
4. Mendirikan organisasi kemasyarakatan untuk :
 - a. Memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya
 - b. Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan dan pelaksanaan pengawasan masyarakat

2.1.3.2 Tahapan Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat

Tahapan Pelaksanaan partisipasi masyarakat menurut Solekhan (2014:153) yaitu :

1. Pengambilan keputusan adalah penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan Bersama
2. Pelaksanaan adalah penggerakkan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
3. Pengambilan manfaat adalah partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai

4. Evaluasi adalah berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemerintahan.

2.1.3.3 Hambatan Partisipasi Masyarakat

Tiga hambatan utama dalam penerapan partisipasi menurut Solekhan (2014:97) yaitu:

1. Hambatan struktural yang membuat lingkungan menjadi kurang kondusif untuk dilaksanakan partisipasi. Kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi dan kebijakan maupun regulasi yang kurang mendukung partisipasi, termasuk desentralisasi fiskal
2. Hambatan internal dari masyarakat, seperti kurang inisiatif, kurang terorganisir, dan kapasitas yang tidak memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan
3. Hambatan yang diakibatkan kurang menguasai metode dan Teknik- Teknik partisipasi.

2.1.3.4 Pengukuran Partisipasi Masyarakat

1. Perencanaan

Adanya kontribusi pemikiran dari masyarakat dalam pembuatan program yang didanai Dana Desa.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Adanya kontribusi Tenaga, keahlian dan kemampuan dari masyarakat dalam melaksanakan program yang didanai Dana Desa.

3. Pengambilan Manfaat

- a. Menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan.
 - b. Melestarikan hasil pembangunan.
4. Evaluasi
- a. Adanya kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan
 - b. Adanya pemberian saran dan kritik dari masyarakat Desa.

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.4.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik yaitu kewajiban suatu organisasi atau pihak tertentu untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau kegiatannya kepada pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban (Halim, 2014 :83).

Akuntabilitas merupakan Kewajiban pihak pemegang Amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi Amanah (principle) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27) .

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa:

“Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran / target kinerja yang

telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan tindakannya kepada pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban secara periodik.

2.1.4.2 Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dimensi Akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2018:28) yang mengutip dari Elwood (1993) yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran adalah terkait dengan penghindaran korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan jabatan, sedangkan Akuntabilitas Hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi. Serta adanya pelayanan publik yang cepat, responsive dan pelayanan publik yang murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas Program terkait dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, serta apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas Kebijakan yaitu pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang telah diambil pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Lembaga publik hendaknya dapat dipertanggungjawabkan serta dampak yang akan terjadi dimasa depan.

2.1.4.3 Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014)

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan

dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan.

Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan formula sebagai berikut:

1. 90% porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar)
2. 10% porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula)
 - a. Jumlah penduduk desa
 - b. Angka kemiskinan desa (35%)
 - c. Luas wilayah desa (10%)
 - d. Tingkat kesulitan geografi desa (30%)

Penggunaan formula tersebut dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan rasio penerima dana desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah yakni 1:4 standar deviasi yang paling rendah.

2.1.4.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Prinsip penggunaan Dana Desa menurut (Raharjo Mu'iz, 2020) yaitu:

1. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kebutuhan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan dengan kepentingan Sebagian besar masyarakat Desa.
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga tanpa membeda-bedakan
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana Desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan Prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

2.1.4.5 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa tahap pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut:

1. Perencanaan

Penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Perencanaan yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disusun secara berjangka.

2. Pelaksanaan

Prioritas belanja desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disetujui dalam musyawarah desa serta sesuai dengan prioritas pemerintah pusat / provinsi/ kabupaten / kota. Oleh karena itu seluruhnya tertuang di RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan dalam APBDesa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Lapornya terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi anggaran. Laporan tersebut disusun oleh kepala desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan tersebut disertai laporan keuangan (laporan realisasi APB Desa dan catatan

atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.1.5 Kajian Empiris

Sebagai bahan acuan dan sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Adapun pengambilan penelitian terdahulu dilakukan supaya dapat membandingkan hasil, objek, dan subjek dari penelitian ini sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

1. Madhalena Giriani, Neneng Dahtiah dan Dian Imanina Burhany (2021) dengan judul” Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Kartika Restu Aprilya dan Astri Fitria (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3. Nurna Pratiwi dan Anik Puji H (2022) dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kulon

Progo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4. Dewi Indriasih, Aminul Fajri dan Dinda Febriana (2022) dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi dan Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
5. Laidestifre Putri Santoso dan Suhesti Ningsih (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
6. Ridha fajri, Restu Agusti dan Julita (2021) dengan judul “pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Regulasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Partisipasi Masyarakat,

Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

7. Putri Indah Pratiwi dan Ratna Sari Dewi (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
8. Ratih S.Panjaitan, Athur S, Yosephine N.S, Septony B.s (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
9. Alya Zhafira, Maya Febrianty dan Aida Yulia (2022) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor yang mempengaruhinya”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Perangkat Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

10. Siti Sarah, Taufeni Taufik, dan Devi Safitri (2020) dengan judul” Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
11. Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas (2019) dengan judul” Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
12. Siti Umaira dan Adnan (2019) dengan judul” Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
13. I Made Agus Suma Arta dan Ni Ketut Rasmini (2019) dengan judul ”Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi

Masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

14. Vivi Valensya Br Karo, Athur Simanjuntak, Mitha Christina Ginting, dan Lamria Sagala (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
15. Sandra Andri Liana dan Wawan Sadtyo N (2022) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.
16. Riski Amaliya dan Maryono (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
17. Henny Hendratmi, JMV Mulyadi dan Tri Widiastuti (2017) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Komitmen terhadap Akuntabilitas Pengelola Anggaran”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan Komitmen

Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelola Anggaran.

18. Mutimatun Ilhami dan Ratieh Widhiastuti (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. Sedangkan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa.
19. Dewi Kusuma Wardani, Adia Adi Prabowo dan Kathon Adi Nugraha (2021) dengan judul” Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan *Whistleblowing System* sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi tidak memiliki pengaruh yang positif pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sedangkan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Whistleblowing System* tidak dapat memoderasi pengaruh positif Komitmen Organisasi perangkat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan *Whistleblowing System* dapat memperkuat pengaruh positif Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

20. Aulia Rahma L.P dan Maryono (2022) dengan judul” Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparat Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan secara Parsial Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparat Desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Transparansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Madhalena Giriani, Neneng Dahtiah dan Dian Imanina Burhany (2021) Desa di Kecamatan Batujajar	-Variabel X: Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat -Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Variabel X: Kompetensi Aparatur dan -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> Vol 1, No. 3 June 2021 ISSN: 2747-12 41 Politeknik Negeri Bandung
2	Kartika Restu Aprilya dan Astri Fitria (2020)	-Variabel X: Komitmen Organisasi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat	-Variabel X: Kompetensi dan -Tempat Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi dan Komitmen Organisasi berpengaruh	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 9, Nomor 3, Maret 2020 ISSN: 2460-0585 Sekolah Tinggi

	Desa di Kabupaten Gresik	-Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Sedangkan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
3	Nurna Pratiwi dan Anik Puji H (2022) Desa di Kabupaten Kulon Progo	-Variabel X: Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat pengelola dana desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa	Akuntansi Dewantara Vol.6 no 1 Bulan April 2022. p-ISSN :2550-0376 e-ISSN: 2549-9637 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
4	Dewi Indriasih, Aminul Fajri, dan Dinda Febriana (2022) Desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	-Variabel X: Komitmen Organisasi, Transparansi -Variabel Y: Akuntabilitas pengelolaan dana desa -Teknik pengumpulan data: Kuesioner	-Variabel X: Sistem Pengendalian Internal, Aksestabilitas Laporan keuangan dan Kompetensi Pemerintah Desa -Tempat Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi pemerintah desa, transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sedangkan komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern	Jurnal ekuitas vol 3, no 4, mei 2022, Hal 972-981 ISSN: 2685-869x Universitas Pancasakti Tegal

			-Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	
5	Laidestifre Putri Santoso, Suprihati, dan Suhesti Ningsih (2022) Desa di Kecamatan Banyudono	-Variabel X: Komitmen Organisasi -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<i>International Journal Of Economics, Business and Accounting Research</i> Vol 6, Issue 3, 2022 E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
6	Ridha Fajri, Restu Agusti dan Julita 2021	-Variabel X: Transparansi, Partisipasi Masyarakat Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Regulasi -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas	Jurnal Al-Iqtishad Vol 17 No 2 tahun 2021 Universitas Riau

		-Teknik Pengumpulan Data: kuesioner	Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Pengelolaan Dana Desa	
7	Putri Indah Pratiwi dan Ratna Sari Dewi 2021 Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik pengumpulan data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Aparatur -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<i>Indonesian Journal Of Business Analytics (JIBA)</i> vol 1, No 2, 2021 E-ISSN: 2808-0718 Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
8	Ratih S Panjaitan, Athur S, Yosephine N. S, Septyony Benyamin S (2022) Desa Motung, Pardumuan Motung, dan Parsoroan Sibisa	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, Transparansi Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Pengumpulan Data	-Variabel X: Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. sedangkan Partisipasi Masyarakat dan Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Manajemen Vol 8 No 1 (2022) Januari – Juni 2022 p-ISSN :2301-6256 e-ISSN: 2615-1928 Universitas Methodist Indonesia

			menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)		
9	Alya Zhafira Maya Febrianty dan Aida Yulia 2022 Desa di Kota Banda Aceh	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi sumber daya manusia, peran perangkat desa -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.7, No 1, Februari 2022 e-ISSN 2581-1002 Universitas Syiah Kuala
10	Siti Sarah, Taufeni Taufik, dan Devi Safitri (2020) Desa di Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Kuala Cenaku dan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragili Hulu	-Variabel X: Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik pengumpulan data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPI -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.4 No.4, Desember 2020 (330-342) e-ISSN:2685-5607 Universitas Riau

		<i>Jalur (Path Analysis)</i>			
11	Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas (2019) Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Internal -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan sistem pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) Volume 10 No 1, Mei 2019. P-ISSN 2086-3748. E-ISSN 2086-3748 STIE Bank BPD Jateng
12	Siti Umaira dan Adnan (2019) Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol.4, No.3 (2019) Halaman 471-481. E-ISSN 2581-1002 Universitas Syiah Kuala

13	I Made Agus Suma Arta dan Ni Ketut Rasmini (2019) Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik Pengumpulan Data	-Variabel X: Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.26.1.Januari (2019): 709-735 ISSN: 2302-8556 Universitas Udayana Bali
14	Vivi Valensya Br Karo, Arthur Simanjuntak, Mitha Christina G, dan Lamria Sagala (2022) Desa Aji Jahe, Desa Aji Buhara, dan Desa Aji Julu, Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo	-Variabel X : Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Aparatur -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Manajemen Vol.8, No. 1 (119_134) p-ISSN: 2301-6256 e-ISSN: 2615-1928 Universitas Methodist Indonesia
15	Sandra Andri Liana dan Wawan Sadtyo N (2022) Desa di Kecamatan Kaliangkrik	-Variabel X: Transparansi, Partisipasi Masyarakat -Teknik pengumpulan	-Variabel X: Kompetensi aparatur desa, dan pengawasan -Variabel Y: Akuntabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap	Jurnal Unimma ac.id p-ISSN:2622-9404 e-ISSN: 2828-0725 Universitas Muhammadiyah Magelang

		n data: Kuesioner	s Pengelolaan Keuangan Desa -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunaka n Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa		
16	Riski Amaliya dan Maryono (2020) Desa di Kecamatan Sukoilo Kabupaten Pati	-Variabel X: Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilita s Pengelolaan Dana Desa -Teknik Pengumpul an Data : Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi, dan Sistem Pengendalia n Internal -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunaka n Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, Vol.13, No 1, Juli 2020, pp. 122-133. P-ISSN : 1979-116x e-ISSN : 2614-8870 Universitas Stikubank Semarang	
17	Henny Hendratmi, JMV Mulyadi, dan Tri Widiastuti (2017)	-Variabel X: Transparans i, Komitmen -Teknik Pengumpul an Data: Kuesioner	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilita s	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan Komitmen berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas	Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Vol. 3, No. 2 Tahun 2017, Hal 76-93 e-ISSN 2502-4159 Universitas Pancasila	

	SMA Negeri dan Swasta Kota Bekasi Barat, Pondok Gede dan Jati Asih		Pengelolaan Anggaran -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Pengelolaan Anggaran	
18	Mutimatun Ilhami dan Ratieh Widhiastuti 2022 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa	-Variabel X: Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat -Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal -Variabel Y: Akuntabilitas Laporan Dana Desa -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. Sedangkan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa	JPAK: Jurnal Pendidikan dan Keuangan Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember), 2022: 185-198
19	Dewi Kusuma	-Variabel X: Komitmen	Penelitian ini Menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Jurnal Akuntansi Manajerial Vol. 6,

	Wardani, Adia Adi Prabowo (2021) Kelurahan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal	Organisasi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	n Whistleblowing System sebagai Variabel Moderating, sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan Whistleblowing System -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. <i>Whistleblowing system</i> tidak dapat memoderasi pengaruh positif komitmen organisasi perangkat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. <i>Whistleblowing system</i> dapat memperkuat pengaruh positif Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	No. 2 (Juli-Desember 2021) 1-16. E-ISSN: 2502-6704 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
20	Aulia Rakhma L.P dan Maryono (2022) Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	-Variabel X: Transparansi Partisipasi Masyarakat, -Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Aparat Desa -Variabel Y: Pengelolaan Dana Desa -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparatur secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Transparansi secara parsial tidak	Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol 4 spesial issue 3 2022. P-ISSN 2622-2191. E-ISSN 2622-2205 Universitas Stikubank

menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.
---	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan Otonom berdasarkan Asas Otonom.

Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014)

Transparansi adalah keterbukaan suatu informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan secara terbuka (Mahmudi, 2016:17) .

Pemerintah Desa dituntut untuk adanya keterbukaan di dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga diperlukan komitmen yang tinggi dari dalam pemerintah desa tersebut supaya informasi yang diberikan kepada masyarakat berkualitas. Jika memiliki komitmen yang tinggi terhadap suatu organisasi maka akan memunculkan rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari kesepakatan dalam organisasi tersebut.

Komitmen Organisasi merupakan sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi, dengan cara tetap bertahan didalam organisasi, memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasi dengan alasan apapun (Yusuf Mardiana & Syarif, 2018:32).

Yusuf Mardiana & Syarif (2018:18) mengatakan bahwa dengan adanya kesiapan mengerahkan upaya yang cukup besar untuk kepentingan organisasi dalam hal keterbukaan terhadap publik terkait dengan pelaporan keuangan. Komitmen organisasi adalah rasa kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan, dan loyalitas karyawan dengan ditunjukkan bukti pengembangan komitmen organisasi melalui berbagai dimensi atau berbagai sumber. Transparansi dengan komitmen organisasi saling berkaitan karena keseluruhan perangkat daerah memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap pelaporan keuangan.

Sejalan dengan hasil penelitian (Rahayu et al., 2020) bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap transparansi.

Menurut Steers & Porter (1974) dalam (Indriasih et al., 2022) Komitmen Organisasi merupakan perilaku dimana seseorang mengidentifikasi dengan harapan dan tujuan organisasi di mana ia bekerja serta berusaha untuk mempertahankan keanggotaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari dalam diri seseorang maka dalam hal pelayanan kepada masyarakat ia akan memberikan pelayanan yang cepat, responsive dan pelayanan publik yang murah biaya serta informasi yang diberikan berkualitas dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Hubungan Transparansi dengan Partisipasi Masyarakat Menurut Solekhan (2014:147) menyatakan bahwa informasi adalah sumber transparansi yang apabila informasi yang disampaikan tidak cukup dimiliki oleh masyarakat, maka implikasinya masyarakat sama sekali tidak berperan dalam semua kebijakan publik sehingga dapat dikatakan tidak ada kesempatan untuk masyarakat menyampaikan partisipasi. Karena dengan adanya transparansi berarti pemerintah berminat untuk menerima kontrol masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah bersedia membuka diri atau melakukan transparansi kepada masyarakat (Solekhan, 2014:149).

Hal ini sejalan dengan penelitian Ricky Prayogi (2019), Yohanes Antonius & Asih Widi (2018) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah maupun potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan serta alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi Isbandi (2007) dalam (Valensya et al., 2022).

Komitmen organisasi dengan partisipasi masyarakat saling berkaitan karena dengan adanya komitmen yang kuat dari dalam diri pemerintah desa untuk menjalankan pemerintah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan adanya pelayanan yang cepat dan responsive serta keterbukaan dan kemudahan dalam memperoleh informasi, maka masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam hal perencanaan sampai dengan tahap evaluasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putri & Novita, 2020) bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap Partisipasi.

Transparansi merupakan tersedianya informasi tentang pemerintahan publik dan adanya kemudahan dalam memperoleh suatu informasi yang akurat dan memadai. (Dwiyanto, 2017:80)

Dwiyanto (2017:228) Mengatakan bahwa Transparansi sangat berkaitan erat dengan Akuntabilitas. Karena dengan adanya transparansi dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui segala informasi pemerintah yang dibutuhkan serta adanya kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan hasil pembangunan . Tanpa Transparansi tidak akan adanya akuntabilitas publik.

Solekhan (2014 :228) Menjelaskan bahwa transparansi sangat penting untuk pengembangan akuntabilitas karena dengan adanya transparansi dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui dan menilai kinerja pemerintah.

Transparansi berkaitan erat dengan akuntabilitas sesuai dengan pernyataan Ridha Fajri, Restu Agusti dan Julita (2021) Unsur utama dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan adanya transparansi. Semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang transparan, maka semakin mudah untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel.

Hasil penelitian (Fajri et al., 2021), (Hendratami et al., 2017), (Panjaitan et al., 2022), bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Komitmen Organisasi merupakan suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Robbins dan Judge 2014:201).

Aparatur yang mempunyai komitmen organisasi yang baik akan memiliki tanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan demi mewujudkan pelayanan yang baik supaya menjadi lebih baik lagi (Aprilya & Fitria, 2020). Bahwasannya perangkat desa harus mempunyai komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasi dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi komitmen yang dimiliki oleh aparatur akan berdampak pada tingkat kecepatan dan ketepatan dalam bekerja sehingga mempengaruhi laporan

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jika aparatur desa berkomitmen untuk bekerja dengan benar, taat pada aturan serta bekerja dengan jujur maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan tercapai.

Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas sesuai dengan pernyataan (Mada et al., 2017) bahwa semakin tinggi komitmen yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka dalam pengelolaan dana desanya semakin akuntabel.

Keterkaitan komitmen organisasi pemerintah desa sejalan dengan penelitian (Giriani et al., 2021), (Sarah et al., 2020), (Putri Santoso et al., 2022), bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi pembangunan (Solekhan 2014:153).

Partisipasi masyarakat sangat berkaitan erat dengan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat yang lebih besar dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (mada et.al,2017). Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan transparansi sehingga tercipta sebuah akuntabilitas.

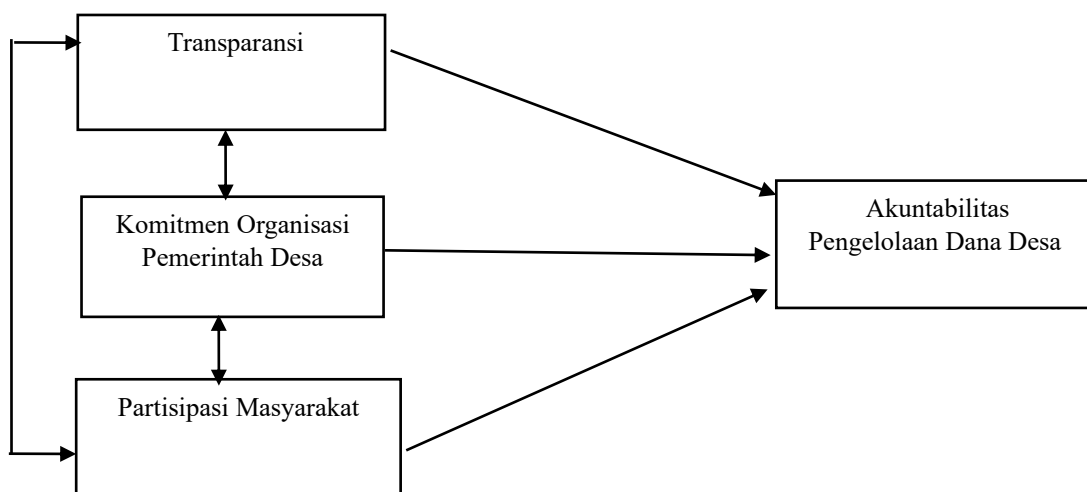
Solekhan (2014 :151) Partisipasi Masyarakat berkaitan erat dengan akuntabilitas, karena masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap Lembaga pemerintah. Akuntabilitas seharusnya dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat, jika

sarana akses saluran ini diberikan oleh pemerintah maka sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol. Keterlibatan masyarakat dapat mengurangi penyimpangan, korupsi dan Tindakan-tindakan kewenangan Lembaga publik dalam mengelola. Dengan begitu partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian Ni Gusti Ayu Ekawati (2022) Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Selain itu Hasil penelitian Siti Umaira dan Adnan (2019) Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Terdapat keterkaitan antara variabel Transparansi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Karena dengan adanya keterbukaan dari pemerintah dan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan maka masyarakat akan ikut berpartisipasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Bertitik tolak dari judul penelitian : Pengaruh Transparansi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat. Maka kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh sebab itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang dimaksud dengan sementara, yaitu jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2019:99).

1. Terdapat hubungan antara Transparansi dengan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, terdapat hubungan antara Transparansi dengan Partisipasi Masyarakat dan terdapat hubungan antara Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dengan Partisipasi Masyarakat pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Terdapat Pengaruh antara Transparansi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya secara Parsial.
3. Terdapat Pengaruh antara Transparansi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya Secara Simultan.